



Diterbitkan oleh:
Laboratorium PKn FIS UNY



Bekerjasama dengan:
AP3KNI Wilayah DI Yogyakarta

Mitra Pelaksana:



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-I

MENEGUHKAN PERAN PROFESI KEWARGANEGARAAN DALAM MERESPONS
DINAMIKA KE-INDONESIAAN KONTEMPORER: PERSPEKTIF POLITIK, HUKUM, DAN
PENDIDIKAN

Editor :

Dr. Samsuri, M.Ag.
Halili, S.Pd., M.A.



Konferensi Nasional
Kewarganegaraan

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN KE-1

Meneguhkan Peran Profesi Kewarganegaraan dalam Merespons Dinamika
Keindonesiaan Kontemporer: Perspektif Politik, Hukum, dan Pendidikan

Editor:

Dr. Samsuri, M.Ag.

Halili, S.Pd., M.A.

Cetakan pertama, Januari 2016

vii + 405 halaman

21cm x 29,7cm

ISBN: 978-602-73791-0-7

Desain sampul dan tata letak:

Zainal Abidin

Penerbit:

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia

(AP3Kni) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat redaksi:

Gedung G.01 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Karangmalang Sleman DI Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 548202

Fax. (0274) 548201

Email: labpkn@uny.ac.id, labpkn.uny@gmail.com

© *all rights reserved*

(7)

MENDONGKRACK PARTISIPASI PEMILU MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

Buchory MS

Guru Besar PPKn Universitas PGRI Yogyakarta

Abstrak

Partisipasi pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru yang tertinggi terjadi pada tahun 1971, yaitu 94 %, sedangkan angka golput 6 %. Penyebabnya karena pemilu tersebut merupakan yang pertama era Orde Baru sehingga masyarakat memiliki antusias yang tinggi karena mereka berharap akan terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini mengalami perubahan pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan pemilu 1997 karena tingkat partisipasi politik makin menurun dan sebaliknya angka golput makin meningkat.

Namun demikian, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilu meningkat menjadi 93,3 % dan hanya 6,7 % yang golput. Pada pemilu 2004 dan 2009, lagi-lagi tingkat partisipasi pemilu menurun menjadi 84,4 %, dan angka golput naik menjadi 15,6%. Angka golput ini naik lagi menjadi 23,37 % sedangkan partisipasi menurun menjadi 76,63% pada pemilu Presiden langsung. Bahkan angka golput terus mengalami kenaikan pada pemilihan kepala daerah langsung di berbagai daerah yang rata-rata mencapai angka 37%, berarti angka partisipasi menurun menjadi rata-rata 63%.

Untuk mendongkrak partisipasi pemilu, perlu ditingkatkan efektivitas pendidikan politik di Indonesia, sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Kata Kunci: *Partisipasi pemilu, dan pendidikan politik*

Pendahuluan

Hampir semua negara-negara di dunia ini menyatakan diri dan memproklamasikan sebagai negara demokrasi, meskipun sebenarnya corak dan sistem demokrasi yang mereka terapkan di negaranya berbeda-beda. Ada negara yang menganut demokrasi dengan sistem parlementer dan ada juga yang menganut demokrasi dengan sistem presidensial. Masing-masing sistem demokrasi tersebut juga bervariasi ditinjau dari bentuk dan sistem pemerintahannya, karena ada negara yang menganut bentuk pemerintahan monarkhi dengan sistem parlementer dan ada negara yang berbentuk monarkhi konstitusional. Selain itu ada juga negara yang menganut

bentuk pemerintahan republik dengan sistem parlementer dan republik dengan sistem presidensial.

Kalau disimak sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia, ternyata sejak jaman nenek moyang dahulu, pilihan bentuk pemerintahan kita adalah monarkhi. Hal ini terbukti bahwa sebelum masa penjajahan dari negara-negara Benua Eropa, seperti Belanda dan Inggris, di negara ini sudah berkembang bentuk kerajaan atau monarkhi, seperti kerajaan Kalingga, Demak, Singosari, Sriwijaya, Majapahit yang kepala pemerintahan dan kepala negaranya seorang raja atau ratu dan bersifat turun temurun. Bentuk pemerintahan monarkhi tersebut berjalan sangat lama di bumi nusantara ini.

Pada saat bangsa ini akan memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, terjadi perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih. Sebagian anggota BPUPKI menginginkan bentuk pemerintahan negara Indonesia yang akan diproklamasikan adalah monarkhi, dengan argumentasi karena bangsa ini sudah lama berpengalaman melaksanakan bentuk pemerintahan monarkhi tersebut. Namun sebagian besar anggota menghendaki bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial, karena dipandang lebih adil sehingga semua warganegara mempunyai peluang untuk dapat dipilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Setelah negara Indonesia merdeka sebagaimana diatur dalam UUD 1945, pilihan bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial. Hal ini seperti diatur pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi 'Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik'. Rumusan pasal ini sangat ideal dan menunjukkan pandangan para pendiri negara yang jauh ke depan karena meskipun secara historis bangsa ini telah lama memberlakukan bentuk monarkhi tetapi pada saat mereka diskusi akan mendirikan negara yang merdeka ternyata memilih bentuk pemerintahan republik.

Di samping itu beberapa pasal dalam UUD 1945 juga menunjukkan pilihan bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial, seperti pasal 4 ayat (1), yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya sebagai kepala negara saja tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Demikian pula Pasal 17 menegaskan bahwa 'Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan'. Dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin kabinet ini menunjukkan ciri-ciri bahwa negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik dengan sistem kabinet presidensial.

Dalam bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial, pilihan sistem demokrasi menurut UUD 1945 (sebelum diamandemen) adalah sistem demokrasi perwakilan. Seperti ditegaskan pada pasal 1 ayat (2) 'Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dipandang sebagai lembaga negara yang merupakan representasi atau penjiwaan rakyat Indonesia karena anggotanya terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan wakil golongan-golongan. Dalam kedudukannya yang demikian, maka MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang tugas pokoknya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Di samping itu MPR juga berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar.

Mengacu pada ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa sistem demokrasi yang dipilih oleh bangsa dan negara Indonesia adalah 'sistem demokrasi perwakilan'. Sistem ini berlangsung sejak awal kemerdekaan sampai dengan akhir masa Orde Baru. Implementasi dari sistem perwakilan ini, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, Gubernur dipilih oleh DPRD Propinsi, sedangkan Bupati/Walikota dipilih oleh DPRD Kabupaten/ Kota.

Pilihan para pendiri negara kita terkait dengan sistem demokrasi perwakilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai akhir masa Orde Baru, dinilai sebagian pengamat sebagai pilihan yang tepat. Sistem demokrasi perwakilan dipandang sebagai pengejawantahan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan'. Artinya dalam pengambilan keputusan di negara ini mestinya kita mengutamakan prinsip musyawarah yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan dan dapat dilakukan melalui perwakilan. Bagi pihak yang berpandangan demikian maka mereka mengusulkan proses pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Tetapi sebagian ahli yang lain memahami makna sila tersebut tidak berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Pada akhirnya pilihan kita adalah demokrasi langsung seperti diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wapres secara langsung dan Pemilukada langsung serta Pemilukada Serentak tanggal 9 Desember yang lalu.

Partisipasi Politik Warganegara

Di negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warganegara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warganegara cenderung meningkat.

Mengacu pendapat Budiardjo (2003), Huntington dan Nelson (2001), pengertian partisipasi politik mencakup: (a) kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindakan politik, (b) dilakukan oleh warganegara biasa dan bukan oleh pejabat pemerintah, (c) dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, (d) semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah terlepas tindakan itu efektif atau tidak, dan berhasil atau gagal, (e) dilakukan secara langsung oleh pelakunya sendiri maupun secara tidak langsung melalui perantara.

Milbrarth dan Goel (1997) membedakan partisipasi politik menjadi empat kategori, yaitu (a) **apatis**, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses

politik, (b) **spektator**, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, (c) **gladiator**, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat, dan (d) **pengritik**, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional.

Di negara Indonesia yang menganut paham demokrasi, partisipasi warganegara senantiasa ditumbuhkembangkan dalam segala aspek kehidupan karena program pembangunan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi warganegara yang makin meluas. Untuk itu pembangunan politik di Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila, dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan warganegara tentang berbagai kewajiban dan haknya sehingga mereka mampu dan mau berperan aktif dalam kegiatan politik.

Kendatipun para ahli sependapat bahwa jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu tidak menyita waktu dan tidak atas prakarsa sendiri, seperti kegiatan berpartisipasi dalam pemilihan umum biasanya cukup besar, namun ternyata fakta objektif menunjukkan sebaliknya. Hal ini terjadi di Indonesia, yaitu tingkat partisipasi politik warganegara terutama dalam menggunakan haknya pada pemilihan umum ternyata mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dari pengalaman menyelenggarakan pemilu sejak Orde Baru, gejala ke arah tidak menggunakan hak pilih (golput) mengalami kenaikan. Hal ini terbukti dari data tingkat partisipasi warganegara dalam pemilihan umum dan yang golput sejak pemilihan umum tahun 1971 sampai dengan 2014. Tingkat partisipasi politik yang tertinggi selama pemilu sejak era Orde Baru terjadi pada tahun 1971, yaitu mencapai 94 %, sedangkan yang golput 6 %. Kondisi ini dapat dimengerti karena pemilu 1971 merupakan pemilu pertama era Orde Baru sehingga masyarakat memiliki antusias yang sangat tinggi karena mereka berharap akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perkembangannya, ternyata partisipasi warganegara mengalami perubahan pada pemilu 1977, karena tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6 % dan berarti yang golput meningkat menjadi 9,4 %. Nampaknya ada kekecewaan dari sebagian masyarakat karena mereka tidak merasakan ada perubahan sehingga mereka

memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan pemilu 1997 tingkat partisipasi politik makin menurun dan angka golput makin meningkat.

Namun demikian, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi warganegara Indonesia meningkat lagi menjadi 93,3 % dan hanya 6,7 % yang golput. Sebagaimana diketahui bahwa pemilu 1999 merupakan pemilu pertama era reformasi, sehingga warganegara kembali antusias berpartisipasi dalam pemilu karena mereka berharap terjadi perubahan dalam kehidupan politik, seperti demokratisasi, desentralisasi, hak asasi manusia yang menjadi bagian dari tuntutan reformasi. Namun pada pemilu 2004, lagi-lagi tingkat partisipasi warganegara dalam pemilu mengalami penurunan 4,9 % menjadi 84,4 %, berarti angka golput mengalami kenaikan menjadi 15,6 %. Warganegara nampaknya juga kecewa dengan pemilu sebelumnya yang diharapkan dapat membawa perubahan di negara ini tetapi ternyata tidak terwujud.

Menyimak kegiatan pemilu sejak bangsa ini memasuki era reformasi, yaitu pemilu pada tahun 2004 dan 2009 yang lalu, ternyata angka partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya mempunyai kecenderungan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah warganegara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau lebih dikenal dengan golongan putih (golput) mengalami peningkatan. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi warganegara pada pemilu, baik untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di negeri ini tentunya cukup memprihatinkan kita semua. Betapa kita tidak prihatin, karena menurut data yang ada jumlah warganegara yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu anggota lembaga legislatif tahun 2009 yang lalu hanya mencapai angka 70,96 % sehingga angka golput sebesar 29,04 %. Hal ini dapat dimaknai bahwa para anggota legislatif di Indonesia masa bakti 2009-2014 ini hanya dipilih dan didukung oleh sekitar dua pertiga dari jumlah warganegara kita yang mempunyai hak pilih, karena hampir sepertiga jumlah pemilih tidak menggunakan haknya atau memilih golput. Namun partisipasi warganegara pada Pemilu anggota legislatif sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2014, yaitu menjadi 75,2 % sedangkan angka golput sebesar 24,8 %.

Jika dibandingkan dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif pada masa reformasi lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004 ternyata tingkat partisipasi warganegara pada pemilu anggota legislatif mencapai angka 84,07 % dan angka golput sebesar 15,93 %. Dengan demikian tingkat partisipasi warganegara pada pemilu anggota legislatif pada tahun 2009, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,11 % dan sebaliknya angka golput juga mengalami kenaikan yang sama, yaitu sebesar 13,11 %. Bahkan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif pada waktu sebelumnya, tingkat partisipasi warganegara pada pemilu 2009 yang lalu adalah yang paling rendah sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sementara itu tingkat partisipasi warganegara pada pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, ternyata kondisinya juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Artinya bahwa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 juga terjadi penurunan tingkat partisipasi warganegara yang menggunakan hak pilihnya dan sebaliknya ada peningkatan angka golput. Hal ini dapat dilihat dari hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juli 2009, bahwa tingkat partisipasi warganegara menggunakan hak pilihnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 72,56 % dan berarti jumlah angka golput sebesar 27,44 %. Tingkat partisipasi warganegara ini ternyata juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Pada putaran pertama pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung tahun 2004, tingkat partisipasi warganegara kita mencapai angka 78,23 %, sedangkan jumlah golput mencapai angka sebesar 21,77 %. Sementara itu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, tingkat partisipasi warganegara mencapai angka sebesar 76,63 % dan sebaliknya angka golput mencapai 23,34 %.

Berdasarkan angka partisipasi warganegara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden di atas, ternyata pada pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden tahun 2009, tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan dibandingkan pemilu yang sama tahun 2004. Walaupun pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2009 hanya dilaksanakan satu putaran tetapi tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan sebesar 5,67 % dan angka golput meningkat sebesar 5,67 % pada putaran pertama. Sedangkan dibandingkan dengan putaran kedua, tingkat partisipasi warganegara juga mengalami penurunan sebesar 4,07 % yang berarti angka golput meningkat sebesar 4,07 %.

Pendidikan Politik Warganegara

Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat partisipasi warganegara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya, baik pada pemilu untuk memilih anggota lembaga legislatif, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Serentak, perlu kiranya ditingkatkan efektivitas pendidikan politik bagi warganegara di Indonesia.

Pendidikan politik merupakan proses pendidikan yang menunjukkan cara bagaimana generasi muda anak bangsa diperkenalkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan bidang politik yang akan dilakukan di masa mendatang jika kelak sudah dewasa. Pendidikan politik itu memiliki berbagai karakteristik, seperti : (1) suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkembangkan pandangannya tentang politik; (2) merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik; (3) kadar atau bobot partisipasi dan perilaku politik seseorang ditentukan oleh seberapa besar intensitas pendidikan politiknya, karena antara pendidikan politik dengan partisipasi dan perilaku politik keduanya saling terkait. Artinya makin luas pengetahuan seseorang berkaitan dengan politik, maka makin tinggi tingkat partisipasinya dalam kegiatan politik, seperti pemilu. Demikian juga sebaliknya makin rendah tingkat pengetahuan seseorang terkait dengan politik, maka tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan politik juga akan rendah.

Kecenderungan adanya penurunan angka partisipasi pemilu dan peningkatan angka golput, diprediksi juga akan terjadi pada pemilihan umum pada masa mendatang, tidak ada jaminan bahwa angka partisipasi pemilu akan meningkat. Apabila hal ini terjadi, maka patut disayangkan karena pemilu dinilai sebagai wahana

yang menentukan untuk menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Betapa tidak, karena pemilu 2004 dan 2009 serta 2014 yang lalu ternyata melahirkan banyak wakil rakyat yang kurang membela kepentingan rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Pemilu pada waktu mendatang harus dapat dijadikan wahana koreksi total dan pertaruhan apakah kita akan terus melahirkan wakil rakyat yang banyak melakukan korupsi dengan melakukan golput, atau kita menggunakan hak pilih sehingga dapat melahirkan wakil rakyat yang memiliki integritas, jujur, anti korupsi, dan membela kepentingan rakyat.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan partisipasi warganegara di bidang politik, ada beberapa jenis lembaga pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara. Mengacu pada pendapat Surbakti (1999), dan Sukemi (2004), serta Sukemi (1992), pendidikan politik yang dapat membentuk sikap dan perilaku politik warganegara dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga berikut: (1) keluarga, (2) lembaga pendidikan, (3) teman sebaya/sepergaulan (*peergroup*), (4) media massa, dan (5) organisasi politik.

Pendidikan Politik melalui Keluarga. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi lembaga yang pertama kali membentuk watak dan kepribadian serta perilaku politik anaknya. Orang tua berperan mengajarkan kepada anaknya untuk mengenal masyarakat, bangsa, dan negaranya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.

Pendidikan Politik melalui Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikenal dengan lingkungan pendidikan formal merupakan lingkungan ke dua setelah keluarga, juga memiliki peranan yang besar dalam membina dan mengembangkan kepribadian seseorang. Ada beberapa aspek lingkungan sekolah yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan partisipasi politik warganegara, yaitu (a) jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan oleh anak, (b) kurikulum sekolah seperti mata pelajaran PPKn, dan (c) aspek lingkungan sekolah. Melalui lembaga pendidikan formal ini, siswa dapat berorganisasi dengan aktif dalam kepengurusan OSIS,

berinteraksi dengan buku-buku di perpustakaan, termasuk kegiatan siswa di bidang ko-kurikuler.

Di samping lembaga pendidikan formal juga ada beberapa lembaga pendidikan non formal, seperti **teman sebaya/sepergaulan (*peergroup*)**. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah insan politik (*zoon politicon*) sehingga senantiasa merasa saling ketergantungan, keterkaitan, dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu kelompok sosial yang menjadi ajang seseorang untuk hidup dengan orang lain adalah teman sebaya/sepergaulan/sepermainan/ seprofesi (*peergroup*). Unit sosial ini mempunyai peranan sebagai media pendidikan politik bagi warganegara.

Media Massa juga merupakan lembaga pendidikan politik yang sangat efektif. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kita senantiasa melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media. Surat kabar, majalah, radio, film, telepon, dan televisi merupakan media yang memungkinkan sumber informasi politik dapat menjangkau audien dalam jumlah besar dan tersebar luas. Satu lagi lembaga pendidikan politik yang bersifat non formal yaitu organisasi politik atau partai politik.

Organisasi politik atau partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warganegara secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Salah satu fungsi organisasi politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan warganegara pada umumnya. Dengan demikian peranan organisasi politik ini bersifat langsung dalam upaya melakukan pendidikan politik bagi warganegara. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu era reformasi ini, perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua. Berbagai upaya perlu dilakukan dan semua lembaga pendidikan politik perlu dilibatkan dan ditingkatkan efektivitasnya. Dengan cara demikian, maka angka golput dapat diminimalisir dan angka partisipasi warganegara dalam menggunakan hak pilihnya dapat dimaksimalkan.

Penutup

Partisipasi politik warganegara Indonesia terutama dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum sejak era orde baru, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini nampaknya merupakan akumulasi dari kekecewaan yang dialami oleh warganegara karena pemilu yang diharapkan merupakan wahana untuk mewujudkan perubahan dalam segala bidang kehidupan menuju ke arah yang lebih baik, ternyata tidak kunjung tiba. Bahkan sebagian dari mereka merasa dikhianati oleh perilaku para anggota legislatif yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Peningkatan partisipasi politik warga negara perlu diupayakan secara terus menerus dengan berbagai cara dan media. Berbagai upaya dapat ditempuh dengan pendidikan politik baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, media massa, *peer group*, dan organisasi politik. Di samping itu juga perlu dilakukan reposisi dan refungsionalisasi lembaga pendidikan termasuk efektifitas mata pelajaran PPKn sebagai media pendidikan politik, agar di samping dapat berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga mampu menanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, John. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Milbrath, Lester and Goel, M.L. 1997. *Political Participation*. Chicago : Rand McNally College Publishing Co.
- Sukemi, BM. 2004. Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik. *Disertasi*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Sukemi, BM. 1992. Partisipasi Mahasiswa IKIP di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum. *Tesis*. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.